



Masyarakat Multikultural Perspektif Indonesia: Mengkaji Ulang Teori Multikultural Bikhu Parekh

Moch. Iqbal¹

¹ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fattah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu
Email: moch_iqbal@iainbengkulu.ac.id

ABSTRACT:

The purpose of this paper is to review Bikhu Parekh's thoughts on the categorization of multiculturalism. Using the literature review method, namely by reviewing available library sources, both off-line and on-line sources. The results of this study resulted in the need to review the multiculturalism categorization of Bikhu Parekh which is often used in multiculturalism studies in Indonesia. First, the categorization of Parek monks is no longer relevant in the current context, both globally and locally. Second, the Multicultural Bikhu Parekh tends to be Western oriented, tends to ignore multicultural forms in various parts of the world. Third, multiculturalism in the Indonesian context has its own characteristics and uniqueness, different from the multicultural characteristics that exist in the West which are the fulcrum of the multicultural categorization of Bikhu Parekh. Multiculturalism in Indonesia is formed naturally. From the beginning, Indonesia, which was formerly known as the Dutch East Indies, was a pluralistic, multi-ethnic society which later formed Indonesia.

Keywords: Society, Multiculture, Indonesia, Bikhu Parekh

ABSTRAK:

Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji ulang pemikiran Bikhu Parekh tentang katagorisasi multikulturalisme. Menggunakan metode kajian pustaka, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang tersedia, baik sumber pustaka off-line maupun sumber pustaka on-line. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa perlu kajian ulang tentang katagorisasi multikulturalisme Bikhu Parekh yang seringkali digunakan dalam studi multikulturalisme di Indonesia. Pertama, katagorisasi Bikhu Parek tidak relevan lagi dalam kontek sekarang, baik secara global maupun kontek lokal. Kedua, Multikultural Bikhu Parekh cenderung Barat oriented, cenderung mengabaikan rupa rupa multikultural di berbagai belahan dunia. Ketiga, multikulturalisme dalam kontek Indonesia mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, berbeda dengan karakteristik multicultural yang ada di Barat yang menjadi titik tumpu katagorisasi multicultural Bikhu Parekh. Multikultural di Indonesia terbentuk secara lama dan alamiah. Sejak dari dulu Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Hindia-Belanda adalah masyarakat yang majemuk, muti-etnis, yang kemudian membentuk Indonesia.

Kata Kunci: Masyarakat, Multikultur, Indonesia, Bikhu Parekh

A. PENDAHULUAN

Sejatinya multikulturalisme bukanlah fenomena khas Barat. Beberapa literatur menegaskan bahwa fenomena tersebut adalah fenomena semua bangsa yang sudah terjadi di massa silam, baik di timur maupun di barat. Hefner (1998: 83) mengatakan bahwa fenomena masyarakat dengan keragaman agama, etnik, bahasa suku, ras sudah terjadi sejak Mughal India, Kerajaan masa Usmani di Timur Tengah, Kerajaan Afrika barat, bahkan Jaman Kerajaan Majapahit di Jawa. Sehingga multikulturalisme bukanlah fenomena khas abad belakangan ini.

Menurut perspektif kajian pendidikan multikultural, tidak bisa dipisahkan dari dinamika sejarah pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Sebelum kelahiran pendidikan multikultural, beberapa peristiwa yang penting yang menandainya. Amerika dengan arus imigran yang tinggi, yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia, membuat bangsa Amerika sangat multikultur. Amerika, Canada, Australia adalah beberapa negara yang sebageian besar adalah berasal dari para imigran atau pendatang.

Sejarah multikulturalisme seringkali identik dengan sejarah masyarakat Amerika, Kanada, dan Australia yang berasal dari jalinan suku bangsa luar yang migrasi ke wilayah mereka. Sehingga negara-negara tersebut sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan juga pendidikan multikultur. Ini dikarenakan masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut dianggap merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya. Meski beberapa kasus belakangan, multikulturalisme Amerika dipertanyakan kembali semenjak Donald Trump menjadi Presiden US dengan menggunakan isu-isu rasis yang anti multikulturalisme. Juga

kematian George Floyd, warga kulit hitam yang meninggal akibat perlakuan yang berlebihan polisi kulit putih Amerika. Sehingga memunculkan gerakan yang sangat massif di seluruh wilayah Amerika dan Eropa dengan menaikkan slogan 'black live matter' (Haddad, 2020).

Fenomena multikultur Amerika-Eropa kemudian melahirkan katagorisasi multikultur perspektif Bikhu Parekh (Parekh, 2010) dengan lima katagorisasi, yaitu multikultural isolasionis, akomodatif, otonomis, kritikal interaktif dan kosmopolitan. Dari kelima katagorisasi tersebut bisa dikaji ulang terkait dengan fenomena multikultur yang berbeda dengan di Indonesia.

Multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia dibentuk dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau yang mencapai ribuan, di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tidak harus ada proses penyatuan budaya-budaya yang sudah ada jauh sebelum Indonesi lahir, seperti Melting Pot Amerika, atau Salad Bowl sekaligus, namun cukup memelihara keanekaragaman suku bangsa tersebut. Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait multikulturalisme perspektif Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Naskah ini disusun menggunakan metode telaah pustaka, dengan cara mengutip pendapat dari tulisan yang telah dibaca, kemudian ditelaah dan dianalisis sesuai dengan kemampuan penulis yang bergiat di dunia pendidikan. Untuk pengumpulan data pada makalah ini digunakan metode pengumpulan data literer, yakni dengan terlebih dahulu menelusuri buku – buku, terutama Parekh, Bikhu. 2010. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan sumber lain yang ada relevansinya dengan masalah – masalah yang dibahas dan melalui jaringan internet

untuk dikaji guna mencari landasan upaya pemecahan persoalan.

Penulisan ini menggunakan kajian pustaka, yaitu dengan menelusuri naskah-naskah jurnal atau buku literatur yang mengkaji seputar desain keilmuan di perguruan tinggi Islam. Juga meneliti hasil-hasil penelitian yang masih terkait dengan penulisan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Multikulturalisme Eropa Amerika

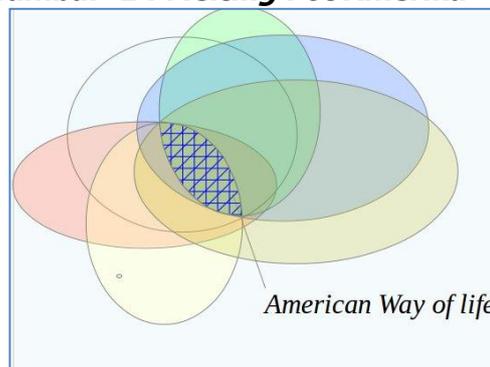
Ada tiga istilah penting sebelum sebelum teori multikultural muncul (Mudzhar, 2005: 180-183), yaitu:

Pertama, istilah *melting pot* pertama kali muncul pada abad 18 yang ditemukan dalam tulisan J Hector seorang imigran asal Normandia, dalam *Letters from an American Farmer* (1782), Hector menginginkan agar orang-orang Amerika yang berasal dari berbagai latar budaya yang sangat heterogen melebur dalam satu budaya baru Amerika. *Melting Pot* yang berarti panci peleburan adalah budaya yang beragam mengalami *melting* (peleburan) ke dalam *pot* (panci) baru yang bernama budaya Amerika. Menerima yang baru dari cara hidup baru yang telah dianutnya, pemerintah yang ditaati, dan pangkat baru yang dia pegang. Mereka menjadi orang Amerika dengan diterima di pangkuan luas. Di sini individu-individu dari semua bangsa *dilebur* ke dalam ras manusia baru, yang pekerjaan dan keturunannya suatu hari akan menyebabkan perubahan besar di dunia.

Istilah *melting pot* menjadi semakin populer dan mulai digunakan secara umum pada tahun 1908, setelah pemutaran perdana drama *The Melting Pot* oleh Israel Zangwill (Wikipedia. Panci Lebur, Unduh 10 Juni 2019). Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestant*

(WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.

Gambar 1 : *Melting Pot* Amerika



Kedua, teori *Salad Bowl*. Teori *Melting Pot* kemudian dikritik yang cenderung akan di-*White Anglo Saxon Protestant*-kan. *Melting pot* dianggap kental dengan nuansa politis, yang mengabaikan rupa-rupa budaya yang ada dalam masyarakat Amerika. Kemudian muncul teori baru yang populer dengan nama *Salad Bowl* sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Dalam tulisan panjangnya *Demokrasi Versus The Melting Pot: Studi Kebangsaan Amerika* (1915), Kallen mengurai kekusutan cara berfikir ala *Melting Pot*, yang cenderung mengabaikan ragam suku bangsa dari para imigran yang hidup di Amerika.

Berbeda dengan *Melting Pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori *Salad Bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.

Ketiga, teori *Cultural Pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di

dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa. Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism*, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit.

Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu. Pada periode inilah pendidikan multikultural mulai diperkenalkan.

Sedangkan multikulturalisme di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang sangat luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tidak harus ada proses penyatuan budaya-budaya yang sudah ada jauh sebelum Indonesia lahir, seperti *Melting Pot* Amerika, atau *Salad Bowl* sekaligus, namun cukup memelihara keanekaragaman suku bangsa tersebut.

2. Kategorisasi Multikultural Bikhu Parekh

Bila mengikuti kategorisasi Parekh dalam Azra (2005), terdapat beberapa karakteristik multikultur, yaitu: *Pertama*, "multikulturalisme isolasionis" yang mengacu kepada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah seperti masyarakat yang ada pada sistem "milled" di Turki Usmani atau masyarakat Amish di A.S. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya.

Kedua, "multikulturalisme akomodatif", yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Sebaliknya kaum minoritas tidak menentang kultur yang dominan. Kelompok ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa Negara Eropa lainnya.

Ketiga, "multikulturalisme otonomis" yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominant dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Konsern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua

kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis kelompok ini didukung oleh kelompok Iuebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bisa menerapkan syaria'ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam dan sebagainya.

Keempat, "multikulturalisme kritikal" atau "interaktif", yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu konsern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya-budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara *genuine*. Jenis kelompok diperjuangkan oleh masyarakat kulit hitam di A.S, Inggris, dan lain-lain.

Kelima, "multikulturalisme kosmopolitan", yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu dan begitu juga sebaliknya, secara bebas terlibat di dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Pendukung jenis ini biasanya intelektual diasporik dan intelektual liberal yang cenderung pada postmodernis. (Ruslan Ibrahim, 2008).

Dari kelima katagorisasi masyarakat multikultur di atas, tidak disebutkan corak dan karakteristik atau model multikultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Apakah isolasionis, akomodatif, otonomis,

kritikal/interaktif atau kosmopolitan. Menjadi penting untuk mengidentifikasi corak multikultural masyarakat Indonesia.

3. Multikultural Perspektif Indonesia
Dari beberapa katagorisasi multikulturalisme Parekh tersebut, semua merujuk pada fenomena masyarakat barat. Masyarakat dunia Timur seolah tidak ada fenomena multikulturalisme sebagaimana yang ada di Barat. Bisa dipertanyakan lebih lanjut, benarkah multikultural isolasionis itu seperti yang ada di 'milled' di Turki atau 'Amish' di AS. Apakah multikultural akomodatif seperti yang ada di Eropa, yang otonomis seperti di Kanada pada masyarakat Imigran Moslem, kritikal/interaktif pada masyarakat Kulit hitam di AS dan Kosmopolitan pada masyarakat diaspora yang tidak menjadikan budaya tertentu sebagai referensi utama, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Bila dilihat dari proses terbentuknya multikulturalisme di Indonesia, corak multikultural masyarakat Indonesia lebih pada multikultural cair (*Liquid Multiculture*). Yaitu multikultur yang masih berdekatan secara etnis dan budaya. Karena berdekatan, relatif tidak ada hambatan dalam berintegrasi di masyarakat. Masyarakat Jawa relatif tidak ada kendala secara etnis kultural bila menikahi orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan bahkan orang Papua.

Berbeda dengan corak multikultural padat (*Solid Multiculture*), di mana masih terdapat kendala dalam integrasi masyarakat. Misalnya proses perkawinan, kelompok masyarakat keturunan Arab cenderung memilih dari satu keturunan. Demikian juga etnis Cina, seringkali mempertimbangkan kelompok satu etnisnya. Pertimbangan etnis sering menjadi referensi utama dalam menentukan keputusan sosial. Sedangkan multikultural sedang, masih ada kendala dalam integrasi di masyarakat namun masih dalam wajar dan tidak ada masalah yang serius dalam berintegrasi.

Tabel 1. Keberagaman Suku Bangsa Indonesia

Suku Bangsa	Populasi	Perseentase	Kawasan utama
Jawa	95.217.022	40,22	Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung
Sunda	36.701.670	15,5	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta
Batak	8.466.969	3,58	Sumatera Utara, Riau
Madura	7.179.356	3,03	Pulau Madura, Jawa Timur, Kalimantan Barat
Betawi	6.807.968	2,88	Jakarta, Jawa Barat
Minangkabau	6.462.713	2,73	Sumatera Barat, Riau
Bugis	6.359.700	2,69	Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah
Melayu	5.365.399	2,27	Pesisir timur Sumatera, Kalimantan Barat
Banten	4.657.784	1,97	Banten
Banjar	4.127.124	1,74	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
Aceh	4.091.451	1,73	Nanggroe Aceh Darussalam
Bali	3.946.416	1,67	Pulau Bali
Sasak	3.173.127	1,34	Pulau Lombok
Dayak	3.009.494	1,27	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
Tionghoa	2.832.510	1,2	Jabodetabek, Kalimantan Barat, Bangka Belitung
Makassar	2.672.590	1,13	Sulawesi Selatan
Cirebon	1.877.514	0,79	Jawa Barat
Gorontalo	1.251.494	0,53	Gorontalo
Minahasa	1.237.177	0,52	Sulawesi Utara

Sumber: Sensus Penduduk 2010

4. Liquid Medium dan Solid Multiculture

Meski terdapat banyak suku dan etnis di Indonesia, masih terdapat titik temu dalam banyak hal. Beberapa di antaranya adalah: 1) terdapat beberapa kesamaan dan dialek dalam penggunaan bahasa daerah; 2) ras atau ciri fisik juga tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan (Melayu); 3) mempunyai religiusitas dan kepercayaan yang dijunjung kuat; 4) mempunyai akar sejarah yang sama, sebagai suku bangsa lokal yang mengalami penjajahan kolonial.

Beberapa kesamaan tersebut membuat persepsi banyak kalangan bahwa, Indonesia adalah dalam lingkup budaya Melayu. Dengan tanpa mengabaikan terdapat sub-kultur yang memang realitasnya terdapat sangat banyak. Suku dan etnis di Indonesia dikenal memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dalam suatu wilayah saja seperti di Bengkulu yang penduduknya relatif sedikit, memiliki beberapa suku lokal. Seperti Lembak, Rejang, Serawai, Muko-muko dan lainnya. Belum lagi suku-suku lainnya pendatang, tentu sangat banyak. Meski terdapat beberapa suku berbeda, namun dalam budaya dan keyakinannya serta etnisitas nampak tidak ada perbedaannya. Sehingga secara budaya (*culture*) tidak memperlihatkan perbedaan sama sekali. Beberapa suku lokal memang memiliki logat dan bahasa sendiri, namun secara umum tidak memperlihatkan perilaku dan kebiasaan yang berbeda.

Masyarakat Malaysia menganggap bahwa suku bangsa Indonesia itu adalah Melayu. Anggapan tersebut relatif tidak mendapat resistensi dari Indonesia. Bila melihat budaya, kepercayaan maupun etnisitas, memang suku-suku di Indonesia relatif tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Meski dalam realitasnya, terdapat sub-kultur yang mempunyai karakter dan kebiasaan-kebiasaan sendiri. Seiring dengan interaksi masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah, suku-suku di Indonesia semakin 'melayu'.

Artinya suku suku di Indonesia bisa mengalami integrasi lebih mudah karena kedekatan budaya dan kesamaan cita cita.

Dalam tradisi kajian akademik, usaha untuk menjelaskan konsep etnisitas dapat diurai melalui dua perspektif, yaitu perspektif esensialis dan konstruktivistik. Dalam pandangan esensialistik, konsep etnisitas dipahami sebagai entitas yang tetap, baku, dan berorientasi pada karakter biologis. Apa yang disebut oleh Clifford Geertz (1973) dalam bukunya *The Interpretation of Culture*, sebagai "primordial" merujuk pada anggapan bahwa etnisitas adalah sebuah identitas yang telah dibawa seseorang sejak lahir. "Primordial" merupakan sesuatu yang bersifat askriptif dan melekat pada setiap orang. Meskipun semua adalah orang Indonesia, masing-masing tetap memiliki identitas primordialnya sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bugis, orang Madura, Orang Minang, orang Melayu, orang Minahasa, orang Dayak, orang Bali, orang Ambon, orang Buton, orang Serui, orang Aceh, orang Papua dan seterusnya (Tirtosudarmo, 2007: 142-143).

Bila mengikuti katagorisasi Parekh dalam Azra (2005), terdapat beberapa karakteristik multikultur, yaitu: *Pertama*, "multikulturalisme isolasionis" yang mengacu kepada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah seperti masyarakat yang ada pada sistem "milled" di Turki Usmani atau masyarakat Amish di A.S. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya.

Kedua, "multikulturalisme akomodatif", yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan cultural kaum minoritas. Masyarakat

multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Sebaliknya kaum minoritas tidak menentang kultur yang dominan. Kelompok ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa Negara Eropa lainnya.

Ketiga, "multikulturalisme otonomis" yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Konsern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis kelompok ini didukung oleh kelompok Iuebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bisa menerapkan syari'ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam dan sebagainya.

Keempat, "multikulturalisme kritikal" atau "interaktif", yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu konsern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya-budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis,

dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara *genuine*. Jenis kelompok diperjuangkan oleh masyarakat kulit hitam di A.S, Inggris, dan lain-lain.

Kelima, "multikulturalisme kosmopolitan", yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu dan begitu juga sebaliknya, secara bebas terlibat di dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Pendukung jenis ini biasanya intelektual diasporik dan intelektual liberal yang cenderung pada postmodernis. (Ruslan Ibrahim, 2008).

Dari kelima katagorisasi masyarakat multikultur di atas, tidak disebutkan corak dan karakteristik atau model multikultural yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Apakah isolasionis, akomodatif, otonomis, kritikal/interaktif atau kosmopolitan. Menjadi penting untuk mengidentifikasi corak multikultural masyarakat Indonesia.

5. Barat Oriented

Dari beberapa katagorisasi multikulturalisme, semua merujuk pada fenomena masyarakat barat. Masyarakat dunia Timur seolah tidak ada ragam unik kelompok masyarakat sebagaimana di Barat.

Bisa dipertanyakan lebih lanjut, benarkah multikultural isolasionis itu seperti yang ada di 'milled' di Turki atau 'Amish' di AS. Apakah multikultural akomodatif seperti yang ada di Eropa, yang otonomis seperti di Kanada pada masyarakat Imigran Moslem, kritikal/interaktif pada masyarakat Kulit hitam di AS dan Kosmopolitan pada masyarakat diaspora yang tidak menjadikan budaya tertentu sebagai referensi utama. Dilihat dari katagorisasi tersebut, hampir semua ciri tersebut ada dalam masyarakat Indonesia.

Bila dilihat dari proses terbentuknya multikulturalisme di Indonesia, corak multikultural masyarakat Indonesia lebih pada multikultural cair (*liquid Multiculture*). Yaitu multikultur yang masih berdekatan secara etnis dan budaya. Karena berdekatan, relatif tidak ada hambatan dalam berintegrasi di masyarakat. Masyarakat Jawa relatif tidak ada kendala secara etnis kultural bila menikahi orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan bahkan orang Papua.

Berbeda dengan corak multikultural padat (*Solid Multiculture*), di mana masih terdapat kendala dalam integrasi masyarakat. Misalnya proses perkawinan, kelompok masyarakat keturunan Arab cenderung memilih dari satu keturunan. Demikian juga etnis Cina, seringkali mempertimbangkan kelompok satu etnisnya. Pertimbangan etnis sering menjadi referensi utama dalam menentukan keputusan sosial. Sedangkan multikultural sedang, masih ada kendala dalam integrasi di masyarakat namun masih dalam wajar dan tidak ada masalah yang serius dalam berintegrasi.

Definisi toleransi beragama (*religious tolerance*) tidak mudah ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar studi tentang toleransi beragama lebih banyak mendeskripsikan sikap yang disebut toleran. Powell dan Clarke (2002: 16) menyatakan bahwa *an attitude of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place*. Dalam pernyataan tersebut, tersirat bahwa toleransi adalah pengecualian (*exception*) atas hal-hal yang sebenarnya tidak disukai, tapi tetap dibiarkan dilakukan. Definisi lain dikemukakan oleh Andrew Cohen (2004: 69), yang menyatakan bahwa *an act of toleration is an agent's intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behaviour, etc.) in situations of diversity, where the agent believes she has the power to interfere*. Dalam definisi tersebut, toleransi

diartikan sebagai sikap untuk tidak mencampuri atau mengintervensi urusan atau perilaku pihak lainnya. Dalam konteks ini, sekolah (SMA Carolus) tidak mempersoalkan latar agama dan etnis para warganya, yang perlu dipelihara adalah saling memahami dan toleran terhadap rupa-rupa etnis dan agama.

6. Etnisitas Indonesia

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, pendidikan multikultural memang lahir di Amerika dengan *setting* sosial adalah para imigran dari berbagai belahan negara di dunia. Mulai dari negara-negara imigran yang hijrah ke "benua baru" tersebut. Imigran yang paling dominan adalah dari kawasan Eropa. Setelah Amerika masuk ke dalam wawasan orang Eropa maka berbondong-bondong orang-orang Eropa dari berbagai negara bermigrasi ke benua tersebut. Tidak hanya orang Eropa tapi juga orang-orang Afrika dan juga Asia. Masyarakat multikultural yang ada di benua Amerika pada masa lalu adalah terbentuk dari hasil kolonialisme dan imperialisme. Orang-orang Afrika didatangkan ke Amerika untuk menjadi buruh kasar, sedangkan orang-orang Asia biasanya datang untuk tujuan berdagang.

Masyarakat multikultur Amerika kemudian terbentuk dari ragam negara. Praktik diskriminasi terutama pada para imigran yang berkulit hitam, memunculkan gerakan kesetaraan, hingga memunculkan gerakan anti rasial, feminisme, *equality* dan sejenisnya. Dalam dunia pendidikan kemudian muncul pendidikan multikultural yang banyak digagas oleh James A Bank (2002: 6).

Sedangkan masyarakat multikultural di Indonesia terbentuk secara alamiah. Sejak dari dulu Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Hindia-Belanda adalah masyarakat yang majemuk, multi-etnis dan multikultural. Oleh sebab itu mengapa dinamakan Indonesia, karena secara etimologis indo berarti campuran dan nesia berarti *nation* atau negara. Artinya, dari awal kelahiran Indonesia berdasarkan realitas sejarah yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan

kesamaan nasib serta cita-cita bersama, sehingga terbentuk Indonesia.

Tentang suku bangsa, ternyata tidak mudah untuk menentukan secara pasti seberapa banyak suku bangsa di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah meneliti tentang suku bangsa yang hasilnya dimuat dalam *Volkstelling* (1930). Sensus Penduduk Indonesia yang dilakukan pada 1970 dan dalam dasawarsa berikutnya, tidak mencantumkan items suku-bangsa. Mengingat hal tersebut, ada kesulitan untuk mengetahui secara pasti laju pertumbuhan penduduk berdasarkan suku-bangsa dan distribusi mereka. Sekalipun demikian, ada pula berbagai usaha untuk mengetahui hal di atas, antara lain pernah dicoba oleh Pagkaka Research (1974), antara lain disebutkan bahwa suku-bangsa Jawa mencapai 45,8 % dari total penduduk Indonesia pada 1974 (sekitar 120.000.000 orang). Berbagai distribusi penduduk Indonesia berdasarkan suku-bangsa ialah Sunda (14,1 %), Madura (7,1 %), Minangkabau (3,3 %), Bugis (2,5 %), Batak (2,0 %), Bali (1,8 %), 24 suku-bangsa lainnya (20,3 %) dan orang Cina (2,7 %). Sementara itu, di kalangan para pakar masih terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan penduduk di Indonesia ke dalam suatu konsep suku-bangsa (Poerwanto, 2006: 1).

Antropolog ternama Koentjaraningrat (1982: 346-347) menilai bahwa berapakah sebenarnya jumlah suku-bangsa di Indonesia, sampai saat ini masih sukar ditentukan secara pasti. Hal ini disebabkan ruang lingkup istilah konsep suku-bangsa dan etnis dapat mengembang atau menyempit, tergantung subyektivitas. Sebagai contoh, paling sedikit di Pulau Flores terdapat empat suku-bangsa yang berbeda bahasa dan adat-istiadatnya, ialah rang Manggarai, Ngada, Ende-Lio dan Sikka. Namun kalau mereka ada di luar Flores, mereka biasanya dipandang oleh suku-bangsa lainnya atau mereka mengidentifikasi dirinya sebagai satu suku-bangsa, ialah Flores.

Salah satu kesulitan tersebut, misalnya mengidentifikasi suku-bangsa Dayak di Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri memiliki suku stnis yang sangat beragam. Menurut catatan H.J.Malinckrodt, orang Dayak diklasifikasikan ke dalam enam rumpun atau *stammen ras*, ialah *Kenya-Kayan-Bahau, Ot Danum, Iban, Moeroet, Klemantan* dan *Poenan*. Selanjutnya jika diamati lebih lanjut, di kalangan orang Dayak Kalimantan ada 405 suku-bangsa yang saling berbeda satu dengan lainnya. Jika mereka berada di luar Pulau Kalimantan, orang lain menyebut mereka dan mereka sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai suku-bangsa Dayak. Demikian juga orang luar Kalimantan, yang diketahui hanyalah suku dayak. Padahal di Kalimantan sendiri antara satu dengan yang lain merasa memiliki perbedaan (Poerwanto, 2006: 2).

Terlebih lagi di Papua yang dikenal dengan kekayaan suku, etnis dan budayanya juga memiliki keragaman yang kompleks. Berdasarkan penelitian dari *Summer Language Institute*, paling tidak terdapat 252 suku-bangsa yang masing-masing memakai bahasa yang berbeda. Namun di luar Papua, suku etnis papua hanya dikenal dengan suku etnis yang tunggal, yaitu suku Asmat.

Demikian juga di Jawa, yang juga memiliki beberapa suku dan etnis yang berbeda. Misalnya suku Jawa, Betawi, Sunda dan Madura. Suku jawa sendiri tidak homogeny, melainkan terbagi menjadi beberapa. Seperti suku jawa *ngapak*, jawa *alus*, jawa *kasar* dan sebagainya. Meskipun dari luar, masyarakat yang tinggal di pulau Jawa itu dianggap orang Jawa. Padahal orang Jawa mempunyai bahasa sendiri, yang seringkali tidak dimengerti oleh orang Sunda atau orang Betawi. Demikian juga sebaliknya. Artinya pulau Jawa yang dianggap homogen secara etnis dan budaya, realitasnya juga berbeda-beda. Mengingat hal tersebut maka, Koentjaraningrat memandang perlu upaya pendefinisian konsep suku-

bangsa di Indonesia secara ilmiah, antara lain dengan mengambil beberapa unsur kebudayaan sebagai indikator yang dapat berlaku bagi semua "suku-suku-bangsa" yang ada di Indonesia.

Belum lagi masyarakat multikultur yang didefinisikan oleh Furnivall (1944), yaitu masyarakat yang terdiri atas dua elemen atau lebih yang hidup sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Sebagai masyarakat majemuk, Indonesia dipandang sebagai tipe masyarakat daerah tropis di mana antara yang memegang kekuasaan dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Kelas penguasa merupakan minoritas, orang-orang Belanda, dan yang dikuasai terdiri dari sejumlah ras yang berbeda. Rakyat bumiputera yang merupakan penduduk mayoritas menempati strata bawah dan menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Sementara etnis Cina merupakan kelas menengah terbesar di antara orang Timur asing lainnya (Arab, India). Dengan menggunakan konsep ini, etnisitas yang selama ini adalah mengacu pada suku, ras dan kelompok budaya dianggap homogen. Multikultural masyarakat tropis seperti Indonesia lebih mengacu pada stratifikasi sosial.

Pandangan Furnivall ini tidak banyak digunakan, namun hanya menggambarkan betapa kompleksnya dan beragamnya kajian tentang etnisitas. Meskipun begitu, menurut Nasikun (1985:35), konsepsi Furnifall itu masih ada kontinuitasnya pada saat ini. Dengan mengabaikan perwujudannya yang bersifat kongkrit kita dapat menangkap esensi konsepsi tersebut terlepas dari ruang dan waktu. Suatu masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dengan sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Secara lebih tegas konsepsi masyarakat multikultur dikemukakan oleh Geertz

(1963:105-157) sebagai suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dan masing-masing terikat ke dalam ikatan primordial. Ikatan primordial merupakan ikatan yang berasal dari unsur "bawaan". Ikatan ini diartikan sebagai perasaan yang lahir dari "yang dianggap ada" dalam kehidupan sosial. Ikatan itu meliputi hubungan darah; hubungan keluarga, kerabat, atau kesukuan, kesamaan ras atau jenis bangsa, kesamaan bahasa atau dialek tertentu, ikatan kedaerahan atau regionalisme, ikatan keanggotaan agama atau aliran agama tertentu, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu (Geertz dalam Sudarsono, 1985:5-7).

Ikatan primordial itu memiliki kekuatan yang memaksa dan sering mengorbankan rasionalitas. Orang yang terikat pada anggota keluarga, suku, atau agama tertentu bukan karena keserasian hubungan pribadi, kebutuhan praktis atau kewajiban yang dibebankannya tetapi karena sedikitnya bobot yang lahir dari ikatan itu sendiri. Secara sosiologis, masyarakat majemuk memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan masyarakat yang non majemuk (homogen). Menurut Piere L van den Berghe (dalam Nasikun, 1987:36) sejumlah karakteristik masyarakat majemuk adalah : (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain: memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang non komplementer: (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coersion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Untuk lebih memudahkan karakteristik multikultural masyarakat Indonesia, yaitu dengan memperbandingkan Multikultural

Indonesia dan Amerika. Paling tidak ada dua faktor perbedaan antara multikultural Amerika dan Indonesia, yaitu pertama faktor sejarah dan faktor proses terbentuknya masyarakatnya. Berikut tabel 5 tentang Perbandingan multikultural Masyarakat Indonesia dan Amerika.

Tabel 2. Perbandingan multikultural Masyarakat Indonesia dan Amerika

Faktor	Indonesia	Amerika
Awal muncul kajian	Berasal dari sumber pustaka kuno Sutasoma oleh Mpu Tantular abad ke 14 pada masa kerajaan Majapahit, dengan mengutip di dalam kitab tersebut yaitu <i>bhinneka tunggal ika</i> , yang artinya berbeda-beda tetapi satu.	Berawal dari <i>melting pot</i> yang muncul pertama kali pada abad 18 yang ditemukan dalam tulisan J Hector seorang imigran asal Normandia, dalam <i>Letters from an American Farmer</i> (1782), Hector menginginkan agar orang-orang Amerika yang berasal dari berbagai latar budaya yang sangat heterogen melebur dalam satu budaya baru Amerika. Kemudian memasuki abad 21 mulai populer istilah pluralism dan multikultural.
Proses terbentuknya Masyarakat	Suku bangsa yang mendiami ribuan pulau-pulau di Indonesia yang masih terdapat keterkaitan secara dekat satu dengan yang lainnya, yaitu rumpun bangsa Melayu. Beberapa suku bangsa yang mungkin agak sedikit berbeda adalah wilayah Indonesia timur, seperti NTT, Maluku dan papua, yang secara ras. Sedangkan suku bangsa 'luar' yang lumayan lama dan eksis di Indonesia adalah etnis Arab dan Cina yang minoritas.	Suku bangsa dari berbagai bangsa di hampir seluruh dunia, yang relatif agak berbeda. Misalnya suku bangsa Afrika, Asia Eropa, Hispanik dan suku bangsa lainnya di dunia. Perbedaan suku bangsa Amerika nampak sangat kentara dalam banyak hal. Misalnya, warna kulit, ras, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Artinya multikultural Amerika sangat kental, karena masyarakat Amerika adalah dari para Imigran seluruh bangsa di dunia yang memiliki karakteristik kuat masing-masing.

Sumber: Diolah dari analisis data

Meski multikultur Indonesia 'tipis-tipis', juga tetap mempunyai potensi konflik besar apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik yang terjadi di beberapa daerah di

Indonesia, seperti di Maluku, Poso, Sambas Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya adalah konflik yang berbau SARA (suku, agama, ras dan adat). Terlebih lagi, berbagai persoalan sosial-ekonomi maupun agama yang muncul berpotensi melibatkan suku bangsa dalam menaikkan eskalasi konflik.

D. PENUTUP

Tidak bisa diingkari bahwa Indonesia mempunyai kekayaan kultural yang sangat luar biasa, dengan keragaman etnis, suku, dan agama. Mendiami seluruh kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merake, dari Miangas hingga pulau Rote. Realitas semacam ini perlu terus mendapat tempat dalam studi multikulturalisme yang terus berkembang. Teori-teori multikultural yang ada sekarang perlu terus dikembangkan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Terlalu lama kajian multikulturalisme hanya berkuat pada teori Bikhu Parekh yang hanya bertumpu pada fenomena multikultur di Barat. Padahal realitas sosiologis bergerak secara dinamis dan unik. Indonesia dengan segala kekayaan budayanya juga memiliki keragaman yang khas, yang berbeda dengan wilayah dan benua lainnya. Saatnya kajian multikulturalisme terus dikembangkan berbasis kekayaan keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2003). Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali IndonesiaBhineka Tunggalika . *Tsaqafah, Vol. I, No.2, tahun 2003.* , 50-57.
- Bank, J. A. (2002). *An introduction to Multicultural Education. Boston-London: Allyn and Bacon Press.* London: Allyn and Bacon Press.
- Cohen, A. (2020). What the Liberal State Should Tolerate Within Its Borders.
- Canadian Journal of Philosophy, Cambridge University Press* , 479 - 513.
- Furnivall. (1994). *Netherlands India A Study of Plural Economy.* USA: Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1973). *Geertz, Clifford. 1973, The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books Inc.* Ney York: Basic Books Inc.
- Haddad, M. (2020). "Mapping US Police Killings of Black Americans" . *Al Jazeera.Com* , Online.
- Hefner, R. W. (1998). Multiple Modernities: Christianity, Islam, and Hinduism in a Globalizing Age, *Annual Review of Anthropology, Vol. 27. Annual Review of Anthropology, Vol. 27.* , 27.
- Ibrahim, R. (2008). Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama. *Jurnal EL TARBAWI 1 (1).* , 1.
- Iqbal, M. (2021). Epistemology of Islamic Science: A searching for Ideal Form and Format of Scientific Design for Islamic Higher Education in Indonesia. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* , 101-112.
- Koentjaraningrat. (1982.). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Aksara Baru.
- Mudzhar, M. A. (2005). *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke Depan: Tinjauan dari Aspek Keagamaan*, dalam M. Ridwan Lubis. (ed.). Jakarta: Balitbang Depag. Jakarta.
- Nasikun. (1987). *Sistem Sosial Indonesia.* Jakarta: CV Rajawali.
- Parekh, B. (2010). *Rethinking Multiculturalism.* Yogyakarta: Kanisius.
- Poerwanto, H. (2006). Poerwanto, Hari. 2006. Hubungan Antar Suku Bangsa

Dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional. Naskah Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. *Naskah Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*, Yogyakarta.

Powell, R. (2002). Powell, "Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines". *Diunduh dari http://www.philosophy.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/13504/Tolerance5_background_reading.pdf, pada 9 Juni 2020*, 5.

Sudarsono, J. (1985). *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.

Tirtosudarmo, R. (2007). *Mencari Indonesia: Domografi Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LIPI.